



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2018**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**JL. SUTAN SYAHRIR NO. 7 PONTIANAK**

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

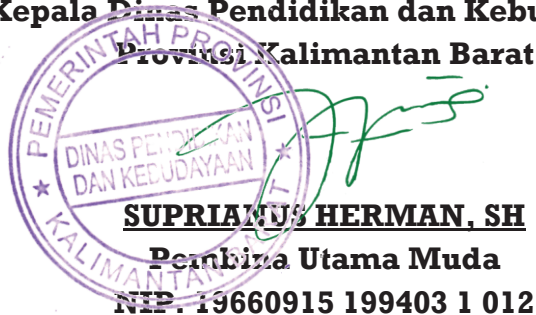
Laporan Kinerja ini disusun sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Eselon II menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Kami menyadari Laporan Kinerja yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “**Good Governance**” di lingkungan internal khususnya, dan Pemerintah Provinsi pada umumnya.

Pontianak, Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Barat



**SUPRIANUS HERMAN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660915 199403 1 012

## **DAFTAR ISI**

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum .....	1
BAB II	PERENCANANAN KINERJA	15
	A. RENSTRA SKPD .....	15
	B. Perjanjian Kinerja .....	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A. Analisis Capaian Indikator Kinerja Organisasi...	24
	B. Realisasi Keuangan .....	36
BAB IV	PENUTUP	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
LAMPIRAN 1 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018		

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

### 1. Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

### 2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

#### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.

Sub Bagian ini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi.

2. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian ini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian ini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan sekolah menengah dan pendidikan khusus.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Kejuruan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Menengah Kejuruan.

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pembinaan tenaga kebudayaan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi bidang Pembinaan Ketenagaan.



Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi:

1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus.

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan

Seksi ini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Tenaga Kebudayaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

- f. Bidang Pembinaan Kebudayaan

Bidang Pembinaan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesenian, cagar budaya dan permuseuman, adat istiadat dan tradisi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pembinaan Kebudayaan



Bidang Pembinaan Kebudayaan membawahi:

1. Seksi Kesenian

Seksi ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis kesenian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cagar budaya dan permuseuman serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Adat Istiadat dan Tradisi

Seksi ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang adat istiadat dan tradisi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan.

Guna mengimplementasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja tersebut, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
  - Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  - Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- c) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
  - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- d) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- e) Bidang Pembinaan Ketenagaan;
  - Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus ;
  - Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan.
- f) Bidang Pembinaan Kebudayaan;
  - Seksi Kesenian;
  - Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - Seksi Adat Istiadat dan Tradisi.
- g) Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tupoksi**

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya menggunakan Nomenklatur Dinas Pendidikan, namun dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 seperti tersebut di atas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- a. perumusan program kerja di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan ketenagaan dan pembinaan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan ketenagaan dan pembinaan kebudayaan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 128 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 156 orang.

1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- |                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| a). Golongan I   | = | 2 orang  |
| b). Golongan II  | = | 9 orang  |
| c). Golongan III | = | 74 orang |
| d). Golongan IV  | = | 71 orang |

2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

a).	S3	=	0 orang
b).	S2	=	23 orang
c).	S1	=	82 orang
d).	D3	=	10 orang
e).	D2	=	0 orang
f).	D1	=	0 orang
g).	S L T A	=	38 orang
h).	S L T P	=	1 orang
i).	SD	=	2 orang

3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

a).	SPAMEN	=	1 orang
b).	SPAMA	=	5 orang
c).	ADUMLA	=	5 orang
d).	ADUM	=	27 orang

4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

a).	Eselon II	=	1 Orang
b).	Eselon III	=	5 Orang
c).	Eselon IV	=	15 Orang
d).	Fungsional Pengawas	=	58 Orang
e).	Fungsional Pamong	=	0 Orang
f).	Guru dan Tenaga Kependidikan	=	4.969 Orang

b. Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Non Organik, yaitu Satpam dengan jumlah 16 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:

- S - 1 : 0 Orang
- D - 3 : 0 Orang

- SLTA : 14 Orang
- SLTP : 2 Orang

### 5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018, bersumber dari dana APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan total dana sebesar Rp892.415.908.140,08 (Delapan ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh rupiah delapan sen) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1)	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Negeri Sipil	449.790.168.530,08
2)	Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	16.022.702.856,00 219.055.348.254,00 207.547.688.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>892.415.908.140,08</b>

Dan dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2018 yang bersumber dari dana APBN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp8.615.327.000,00 (Delapan milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018**

---

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	0,00
2.	Belanja Barang	8.615.327.000,00
3.	Belanja Modal	0,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.615.327.000,00</b>

Perbandingan dana yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun 2017 s.d. 2018, yaitu :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Ket.
1.	Dana APBD	896.297.906.807,34	892.415.908.140,08	-0,43 %
2.	Dana APBN	9.342.628.000,00	8.615.327.000,00	-7,78 %

### 3. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

#### a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

Kendaraan Roda Dua = 9 unit

Kendaraan Roda Empat = 5 unit

c. Komputer

Komputer yang tersedia = 63 unit

Komputer untuk Lab. Bahasa = 31 unit

Laptop yang tersedia = 48 unit

Komputer Bantuan Pemerintah Korea = 43 unit

d. Genset yang tersedia = 1 unit

**B. Permasalahan Utama**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru di Kalimantan Barat.
2. Jumlah guru yang akan memasuki masa pensiun pada rentang waktu tahun 2019 s.d 2024 adalah sebanyak 5.651 orang.
3. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan. Sementara itu rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
4. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Bidang Pendidikan
5. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota masih belum sinkron terhadap data dan capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.



6. Belum efektifnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga validitas informasi data dari sekolah tidak dijamin keakuratannya.
7. Belum terakomodirnya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 9 (sembilan) Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional
2. Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan
3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
4. Meningkatnya Kepastian Pendidikan
5. Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan
6. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah
7. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah
8. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah
9. Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat selain menggambarkan sejauh mana keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan tahun 2018, juga memuat strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Laporan Kinerja yang disusun ini

diharapkan dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur dalam upaya mewujudkan “*Good Governance*”.

Berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pendidikan dengan mengacu pada ketentuan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program-program pendidikan.
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pendidikan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan USB, RKB dll, untuk mencapai kesinergisan antara penurunan APK dan peningkatan APM.
6. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Pendidikan (Education Building).
7. Lebih meningkatkan Tim Work antar bidang/bagian.
8. Lebih meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.
9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Di samping itu, RENSTRA juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, program yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi tuntutan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan RENSTRA sebagai berikut :

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang berbeda namun pada prinsipnya mempunyai tujuan akhir yang hampir sama.

Penempatan visi merupakan hal yang sangat fundamental untuk menentukan cara pandang, arah dan apa yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memberikan arah dan fokus yang jelas serta memiliki orientasi terhadap masa depan, ditetapkan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN LAYANAN  
PENDIDIKAN YANG OPTIMAL UNTUK MENCAPAI**

---

**MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG CERDAS DAN BERBUDAYA”.**

Visi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah lembaga yang mempunyai nilai-nilai utama yang fundamental yang dapat memberikan motivasi dan arah serta pedoman sebagai kerangka wawasan ideal sebagai tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita masa depan yang diinginkan.

**b. Misi**

Misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan tujuan instansi dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Misi juga menjelaskan sebagaimana organisasi itu ada, apa yang dilakukan serta bagaimana melakukannya.

Berdasarkan Visi di atas, ditetapkan 4 (empat) Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
2. Meningkatkan perluasan akses, kualitas, keterjangkauan dan tata kelola pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
3. Mewujudkan kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
4. Mewujudkan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Keempat Misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Misi Pertama:

Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

**Tujuan:**

1. Terwujudnya peningkatan layanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di sekretariat, bidang dan UPT.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana di sekretariat, bidang dan UPT.
3. Terpenuhinya Formasi Aparatur di sekretariat, bidang dan UPT.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur di Sekretariat, Bidang, dan UPT.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Sekretariat, Bidang dan UPT.
3. Meningkatnya jumlah aparatur di Sekretariat, Bidang dan UPT.

b. Misi Kedua:

Meningkatkan perluasan akses, kualitas dan tata kelola pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

**Tujuan:**

1. Terwujudnya peningkatan angka melek huruf.
  2. Tersedianya layanan pendidikan di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
  3. Tersedianya layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.
  4. Tersedianya layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus.
-

5. Terwujudnya kualitas layanan dan tata kelola pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
6. Tersedianya system informasi layanan pendidikan yang terintegrasi.

**Sasaran:**

1. Mengurangi angka buta aksara 15 s/d 59 tahun.
  2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS)
  3. Meningkatkan APK dan APM pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
  4. Menurunkan angka putus sekolah untuk semua jenis dan jenjang pendidikan
  5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan menengah.
  6. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus.
  7. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
  8. Terlaksananya manajemen pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Tersedianya layanan pendidikan di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
  10. Terlaksananya peningkatan manajemen satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
  11. Terlaksananya peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
  12. Tersedianya data pendidikan dan kebudayaan yang terbaru, valid dan sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.
-

c. Misi Ketiga:

Mewujudkan kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

**Tujuan:**

1. Terwujudnya kesetaraan dalam memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat..
2. Terwujudnya kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan Dasar.
3. Terwujudnya kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan Menengah serta Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
4. Terjaminnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
5. Terjaminnya kepastian layanan pendidikan dasar.
6. Terjaminnya kepastian layanan pendidikan menengah.
7. Terjaminnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
8. Terjaminnya layanan pendidikan di daerah kawasan perbatasan.

**Sasaran:**

1. Meningkatkan layanan siswa pendidikan dasar yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan geografi.
  2. Meningkatkan layanan siswa pendidikan menengah yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan geografi.
  3. Meningkatkan layanan pendidikan menengah yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan geografi.
  4. Meningkatkan layanan PKPLK yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan geografi.
  5. Mewujudkan kepastian peserta didik untuk menamatkan jenjang pendidikan Dasar.
  6. Mewujudkan kepastian peserta didik untuk menamatkan PKPLK.
-



7. Mewujudkan kepastian peserta didik untuk menamatkan jenjang pendidikan Menengah.
8. Mewujudkan kepastian peserta didik untuk menamatkan jenjang PAUD dan DIKMAS.
9. Mewujudkan kepastian pendidikan di kawasan perbatasan untuk jenjang Pendidikan Menengah
10. Mewujudkan pendidikan berasrama untuk jenjang pendidikan menengah di daerah kawasan perbatasan.

d. Misi Keempat:

Mewujudkan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

**Tujuan :**

1. Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas pelaku seni , inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni
3. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penghargaan keragaman budaya, peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta pengelolaan budaya tradisional.
4. Terwujudnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dokumentasi sejarah dan nilai budaya.
5. Terwujudnya nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa dan pengakuan terhadap budaya daerah serta lintas budaya.

**Sasaran:**

1. Meningkatkan pelestarian cagar budaya
  2. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum
-

3. Meningkatnya kreatifitas dan kualitas pelaku seni
4. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni
5. Meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya
6. Meningkatkan inventarisasi penulisan dan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya.
7. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya.
8. Meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sebagai warisan nasional dan dunia.

**a. Indikator Kerja Utama**

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

<b>Indikator Kerja Utama</b>
Persentase Guru SMA/MA/SMK Kualifikasi S1/D4
Persentase Guru SMA/MA/SMK Bersertifikasi
APM SMA/MA/SMK
APK SMA/MA/SMK
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
Angka Melek Huruf
Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap siswa
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang tercatat secara nasional/dunia
Persentase satuan Pendidikan yang mengajarkan Pendidikan Karakter
Jumlah prestasi Kesenian di Tingkat Nasional
Jumlah prestasi Kesenian di Tingkat Internasional

---

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018**

---

**B. Perjanjian Kinerja**

SKPD / UPT : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Barat

TAHUN ANGGARAN : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Persentase Guru SMA/MA/SMK Kualifikasi S1/D4	92,65
		Persentase Guru SMA/MA/SMK Bersertifikasi	62,00
2	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	APM SMA/MA/SMK	57,90
		APK SMA/MA/SMK	74,95
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,48
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	99,60
4	Meningkatnya Kepastian Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,92
		Angka Melek Huruf	98,15
5	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan	Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap siswa	1:30
6	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang tercatat secara nasional/dunia	2
7	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Persentase satuan Pendidikan yang mengajarkan Pendidikan Karakter	100,00
8	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	Jumlah prestasi Kesenian di Tingkat Nasional	2
9	Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Jumlah prestasi Kesenian di Tingkat Internasional	1

**C. Anggaran Sasaran Strategis**

Program	Anggaran		
	APBD	APBN	TOTAL
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional	6.173.110.600,00	1.725.975.000,00	7.899.085.600,00
Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	185.300.517.000,00	6.554.782.000,00	191.855.299.000,00
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.907.754.000,00	-	1.907.754.000,00
Meningkatnya Kepastian Pendidikan	1.049.867.500,00	-	1.049.867.500,00
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan	233.439.143.540,00	334.570.000,00	233.773.713.540,00
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	1.550.898.000,00	-	1.550.898.000,00
Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	488.670.000,00	-	488.670.000,00
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	6.990.472.800,00	-	6.990.472.800,00
Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	0,00	-	0,00
<b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2018</b>	<b>436.900.433.440,00</b>	<b>8.615.327.000,00</b>	<b>445.515.760.440,00</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator Kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

#### Sasaran 1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional

Sasaran strategis ini merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas. Tingkat keberhasilan sasaran strategis ini dapat tergambar dari capaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4	92,65	93,80	101,24
		Persentase guru SMA/MA/SMK bersertifikasi	62,00	27,05	43,63

Berdasarkan tabel di atas, persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4 yang ditargetkan 92,65 persen, realisasinya melampaui target, yaitu 93,80 persen sehingga capaian kerjanya mencapai 101,24 persen. Faktor yang dapat

---

mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program subsidi peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4.

Peningkatan indikator kinerja sumber daya aparatur yang profesional di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel di bawah ini menggambarkan peningkatan yang signifikan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun dari 2016 s.d 2018.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4	91,90	92,65	93,80	92,65
		Persentase guru SMA/MA/SMK bersertifikasi	60,34	30,25	27,05	62,00

Berdasarkan tabel di atas, persentase guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4 di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2016 adalah 91,90 persen, dan pada Tahun 2017 meningkat sebesar 0,75 persen menjadi 92,65 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,68 persen menjadi 94,33 persen. Angka ini jauh melampaui target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar hingga Tahun 2018, yaitu 92,65 persen.

Persentase guru SMA/MA/SMK bersertifikasi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016 adalah 60,34 persen, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 30,25 persen, dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 27,05 persen. Penurunan angka persentase guru yang bersertifikasi dikarenakan banyaknya guru yang sudah bersertifikasi yang memasuki masa pensiun. Selain itu, dari hasil Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai evaluasi terhadap kualitas guru yang sudah bersertifikasi maupun bagi guru calon penerima sertifikat pendidik masih di bawah standar nilai yang seharusnya sehingga menyebabkan penurunan

---

persentase guru bersertifikasi. Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian indikator ini salah satunya adalah melalui program peningkatan mutu guru yang sudah sertifikasi maupun guru calon penerima sertifikat pendidik.

### **Sasaran 2. Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan**

Indikator pendidikan lainnya yang memengaruhi tingkat capaian akses pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan rata-rata lama sekolah. Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Tabel 3.3  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	APM SMA/MA/SMK	57,90	57,96	100,10
		APK SMA/MA/SMK	74,95	81,9	109,27
		Rata-rata lama sekolah	7,48	7,63	102,01

Berdasarkan tabel di atas, Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan menengah yang ditargetkan sebesar 57,90 persen, realisasinya melampaui target, yaitu sebesar 57,96 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,10 persen. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Kasar yang ditargetkan sebesar 74,95 persen, tercapai sebesar 71,10 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah 109,27 persen.

Untuk Rata-rata Lama Sekolah yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 7,48 tahun, realisasinya adalah 7,63 sehingga capaian kinerjanya adalah 102,01 persen.

---



Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian indikator ini salah satunya adalah melalui program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK dan lebih meningkatkan program pendidikan kesetaraan.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	APM SMA/MA/SMK	55,60	57,88	57,96	57,90
		APK SMA/MA/SMK	72,31	72,33	71,10	74,95
		Rata-rata lama sekolah	7,28	7,37	7,63	7,48

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator untuk sasaran strategis Meningkatkan Perluasan Akses Pendidikan dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami peningkatan yang positif.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi	Target Nasional	persen
1	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	APM SMA/MA/SMK	57,96	71,12	81,50
		APK SMA/MA/SMK	81,9	84,09	97,40
		Rata-rata lama sekolah	7,63	8,7	87,70

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi provinsi Kalimantan Barat untuk indikator APM SMA/MA/SMK, APK SMA,MA/SMK dan Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018 masih di bawah target nasional.

### Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tingkat keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator angka kelulusan siswa, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	Angka kelulusan SMA/MA/SMK	99,60	84,86	85,20

Berdasarkan tabel di atas, Angka kelulusan SMA/MA/SMK di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ditargetkan sebesar 99,60 persen, realisasinya adalah sebesar 84,86 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 85,20 persen. Tidak tercapainya target indikator ini di antaranya disebabkan pada tahun ajaran 2018 ini soal ujian lebih sulit karena penerapan standar *higher order thinking skills* (HOTS) dan perubahan metode ujian dari kertas ke komputer, sehingga siswa memerlukan proses adaptasi.

Tabel 3.7  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	Angka kelulusan SMA/MA/SMK	98,14	98,98	84,86	99,60

Berdasarkan tabel di atas, Angka kelulusan SMA/MA/SMK di provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Faktor yang dapat mendorong

peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program peningkatan mutu guru SMA/SMK.

#### **Sasaran 4, Meningkatnya Kepastian Pendidikan**

Tingkat keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya kepastian pendidikan ini dapat tergambar melalui capaian kinerja indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Kepastian Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,92	0,62	148,38
		Angka Melek Huruf	98,15	98,30	100,15

Berdasarkan tabel di atas, Angka putus sekolah SMA/MA/SMK di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,92 persen, realisasinya adalah sebesar 0,62 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah 148,38 persen. Sedangkan untuk angka melek huruf yang ditargetkan 98,15 persen pada tahun 2018, berhasil direalisasikan sebesar 98,30 persen, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,15 persen.

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK dan meningkatkan program-program pendidikan non formal.

Tabel 3.9  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Kepastian Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	1,01	0,31	0,62	0,92
		Angka Melek Huruf	98,06	98,24	98,30	98,15

Berdasarkan tabel di atas, Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Kalimantan Barat tahun 2016 sebesar 1,01 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 0,31 persen, namun meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 0,62 persen. Sedangkan untuk Angka Melek Huruf dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami peningkatan yang positif dan melampaui target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.10  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2018	Target Nasional	persen
1	Meningkatnya Kepastian Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,62	0,90	145,16
		Angka Melek Huruf	98,30	96,59	101,77

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi provinsi Kalimantan Barat untuk indikator Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK dan indikator Angka Melek Huruf Kalimantan Barat tahun 2018 sudah melampaui target nasional.

### **Sasaran 5, Tata Kelola dan Layanan Pendidikan**

Tingkat keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya tata kelola dan layanan pendidikan ini dapat tergambar melalui capaian kinerja indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.11  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan	Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap siswa	1:30	1:31	96,77

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru SMA/MA/SMK terhadap siswa di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ditargetkan sebesar 1:30, realisasinya adalah sebesar 1:31, sehingga capaian kinerjanya adalah 96,77 persen. Tidak tercapainya target dari indikator ini disebabkan oleh tidak selarasnya antara

peningkatan jumlah siswa SMA/MA/SMK di Kalimantan Barat dengan jumlah guru yang jumlahnya justru menurun akibat pensiun dan penghentian kontrak pada guru yayasan dan honor daerah.

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian indikator ini salah satunya adalah melalui penambahan jumlah guru yang menyesuaikan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan siswa yang cenderung naik sebagai konsekuensi logis akibat penambahan daya tampung sekolah melalui program Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas dalam rangka meningkatkan APK dan APM SMA/MA/SMK di provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.12  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan	Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap siswa	1:20	1:20	1:31	1:30

Terjadinya peningkatan rasio perbandingan antara guru terhadap siswa pada tahun 2018 diakibatkan oleh penurunan jumlah guru akibat guru PNS yang memasuki usia pensiun dan tidak diperpanjangnya kontrak pada guru yayasan/guru honor daerah/guru tidak tetap sebesar 29,08% dari tahun 2017.

Selain itu, pada tahun 2018 juga terjadi peningkatan jumlah siswa sebesar 11,56% sebagai salah satu konsekuensi dari bertambahnya Ruang Kelas Baru (RKB) pada tahun 2018 sebanyak 102 unit dan ruang kelas yang direhabilitasi sebanyak 201 unit ruang kelas.

### **Sasaran 6, Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah**

Keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah dapat diukur dari capaian kinerja indikator jumlah cagar budaya dan

---

warisan budaya provinsi Kalimantan Barat yang tercatat di tingkat nasional/dunia, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang tercatat secara nasional/dunia	2	7	350,00

Berdasarkan tabel di atas, jumlah cagar budaya dan warisan budaya provinsi Kalimantan Barat yang ditargetkan untuk dicatat secara nasional/dunia adalah sebanyak 2 cagar budaya/ warisan budaya, dan berhasil direalisasikan sebanyak 7 warisan budaya, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 350 persen.

Warisan Budaya Kalimantan Barat yang tercatat di tingkat nasional tersebut adalah “Penganten Dayak Kanayatn”, “Faradje”, Naik Dango Dayak Kanayatn”, “Sayo’ Keladi Pontianak”, “Pacri Nenas Pontianak”, “Silotong”, dan “Mani’ Bunga Setaman”.

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang tercatat secara nasional/dunia	2	9	7	2

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator dari sasaran strategis ini sejak tahun 2016 sudah mencapai target akhir Renstra dan pada tahun 2017 dan 2018 realisasi capaian indikatornya jauh di atas yang ditargetkan.

---

### Sasaran 7, Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah

Keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah dapat diukur dari capaian kinerja indikator persentase satuan pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter di provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.15  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Persentase satuan pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, persentase satuan pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 persen, realisasinya adalah sebesar 100 persen, sehingga capaian kerjanya adalah 100 persen.

Tabel 3.16  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Persentase satuan pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat sudah menerapkan pendidikan karakter secara konsisten sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.



**Sasaran 8, Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya,**

Keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keragaman budaya dapat tergambar dari capaian kinerja indikator jumlah prestasi kesenian yang diperoleh di tingkat nasional, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.14  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	Jumlah prestasi kesenian di tingkat nasional	2	5	250

Berdasarkan tabel di atas, jumlah prestasi kesenian yang ditargetkan provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional adalah sebanyak 2 prestasi, dan berhasil direalisasikan sebanyak 5 prestasi yang diperoleh provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 250 persen.

Prestasi kesenian yang berhasil diperoleh di tingkat nasional tersebut adalah Lomba Ceramics Craft (juara 2), FLS2N Lomba Mendongeng (juara 2), FLS2N Lomba MTQ (juara harapan 3), LKSN Lomba Kreasi Barang Bekas (juara harapan 3), dan LKSN Lomba Merangkai Buah dan Bunga (juara harapan 3).

Tabel 3.15  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	Jumlah prestasi kesenian di tingkat nasional	2	3	5	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah prestasi kesenian provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Barat memiliki daya saing yang tinggi dalam bidang seni budaya di tingkat nasional.

---

### Sasaran 9, Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

Tingkat keberhasilan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan kebudayaan daerah dapat diukur melalui indikator jumlah prestasi kesenian provinsi Kalimantan Barat di tingkat internasional.

Tabel 3.16  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	persen
1	Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Jumlah prestasi kesenian di tingkat internasional	1	0	0

Berdasarkan tabel di atas, jumlah prestasi kesenian yang ditargetkan provinsi Kalimantan Barat pada dokumen Renstra untuk di tingkat internasional adalah sebanyak 1 prestasi, namun tidak terrealisasikan karena pada tahun 2018, tidak tersedia anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini dikarenakan pada tahun 2018 provinsi Kalimantan Barat tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni/budaya di tingkat internasional, namun hanya berpartisipasi dalam pagelaran seni/budaya di tingkat internasional saja yang penganggarnya masuk ke dalam sasaran strategis ke-6 di atas.

Tabel 3.17  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2016 s.d 2018**

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2018
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Jumlah prestasi kesenian di tingkat internasional	1	2	0	2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 provinsi Kalimantan Barat meraih 1 prestasi kesenian di tingkat internasional, dan pada tahun 2017 provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih 2 prestasi kesenian di tingkat internasional. Akan tetapi pada tahun 2018 provinsi Kalimantan Barat

tidak turut serta dalam kompetisi kesenian di tingkat internasional sehingga tidak ada prestasi yang diraih.

## **B. REALISASI KEUANGAN 2018**

Salah satu sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah diuraikan pada bagian A pada bab III ini adalah *sumber dana*, Sumber dana tersebut, telah dituangkan dalam APBD dan APBN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yang merupakan komitmen pemerintah Provinsi untuk mencapai sasaran tersebut.

Khusus realisasi penyerapan Anggaran Dana APBD Tahun 2018, berdasarkan realisasi anggaran dalam Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, penyerapan anggaran keuangan: 97,84 persen yaitu sebesar Rp873.158.004.550,00 dari anggaran sebesar Rp892.415.908.140,08 dan fisik : 99,25 persen. Tidak terserapnya anggaran APBD 100 persen dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga ada sisa Dana sebesar Rp 19.257.903.590,08 dan Realisasi Anggaran APBN sebesar 99,27 persen yaitu sebesar Rp8.553.512.800,00 dari anggaran sebesar Rp8.615.327.000,00 dan Fisik : 100 persen. Tidak terserapnya anggaran APBN karena adanya efisiensi anggaran, sehingga tersisa dana yang tidak terserap sebesar Rp61.814.200,00.

### **1. Per Sasaran Program Strategis APBD**

Dana yang telah disediakan tersebut jika dirinci menurut sasaran tahun 2018 sebanyak 9 Sasaran Strategis dengan penyerapan dana sebagai berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>APBD</b>		
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>persen</b>
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional	6.173.110.600,00	5.108.982.136,00	82,76persen
Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	185.300.517.000,00	183.377.570.690,00	98,96persen

---

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.  
TAHUN 2018**

Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.907.754.000,00	1.551.368.000,00	81,32persen
Meningkatnya Kepastian Pendidikan	1.049.867.500,00	965.834.900,00	91,99persen
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan	233.439.143.540,00	207.469.796.589,00	89,23persen
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	1.550.898.000,00	1.531.955.240,00	98,78persen
Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	488.670.000,00	488.670.000,00	100persen
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah	6.990.472.800,00	6.248.072.237,00	89,38persen
Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	0,00	0,00	0,00persen
<b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2018</b>	<b>436.900.433.440,00</b>	<b>406.742.249.792,00</b>	<b>93,10persen</b>

## 2. Per Mata Anggaran Dana APBD Tahun 2018

Dana yang telah disediakan tersebut jika dirinci menurut mata anggaran tahun 2018 dengan penyerapan dana sebagai berikut :

<b>Mata Anggaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>persen</b>
Belanja Tidak Langsung	449.790.168.530,08	465.396.843.995,00	103,47
Belanja Langsung	235.078.051.110,00	216.609.739.555,00	92,14
Belanja Modal	207.547.688.500,00	191.151.421.000,00	92,10
<b>Jumlah</b>	<b>892.415.908.140,08</b>	<b>873.158.004.550,00</b>	<b>97,84</b>

### 3. Anggaran APBN Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	APBN		
	ANGGARAN	REALISASI	persen
Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan	6.554.782.000,00	6.493.317.800,00	99,06persen
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional	1.725.975.000,00	1.725.721.000,00	99,99persen
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan	334.570.000,00	334.474.000,00	99,97persen
<b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2018</b>	<b>8.615.327.000,00</b>	<b>8.553.512.800,00</b>	<b>99,27persen</b>

### 4. Anggaran Sasaran Strategis

#### A. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp6.173.110.600,00 dan telah terealisasi sebesar Rp45.108.982.136,00 atau 82,76 persen dari anggaran, Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

#### B. Meningkatkan Perluasan Akses Pendidikan

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp185.300.517.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp183.377.570.690,00 atau 98,96 persen dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

#### C. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp1.907.754.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.551.368.000,00

atau 81,32 persen dari anggaran, Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

**D. Meningkatnya Kepastian Pendidikan**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp1.049.867.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp965.834.900,00 atau 91,99 persen dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100,00 persen.

**E. Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pendidikan**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp233.439.143.540,00 dan telah terealisasi sebesar Rp207.469.796.589,00 atau 89,23 persen dari anggaran, Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

**F. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp1.550.898.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.531.955.240,00 atau 98,78 persen dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100,00 persen.

**G. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp488.670.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp488.670.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100,00 persen.

**H. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Daerah**

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran strategis ini sebesar Rp6.990.472.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp6.248.072.237,00

atau 89,34 persen dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik sasaran ini pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

**I. Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Daerah**

Pada tahun 2018, tidak tersedia anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini dikarenakan pada tahun 2018 provinsi Kalimantan Barat tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni/budaya di tingkat internasional, namun hanya berpartisipasi dalam pagelaran seni/budaya di tingkat internasional saja yang penganggarnya masuk ke dalam sasaran strategis pada poin F di atas.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang.

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu pada ketentuan.



2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan Kebudayaan.
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.